



Kearifan Lokal dan Sistem kepemimpinan Adat Suku Kanum dalam Pengelolaan Ruang Hidup di Wilayah Perbatasan Merauke

Nur Jalal¹, Syahrabudin Husein Enala²

^{1,2} Ilmu Administrasi Negara Universitas Musamus

nurjalal242@gmail.com ¹ syahrabudinhuseinenala@unmus.ac.id ²

Received: 08-11-2025

Accepted: 09-15-2025

Published: 15-09-2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kearifan lokal dan sistem kepemimpinan adat Suku Kanum dalam pengelolaan ruang hidup di wilayah perbatasan Merauke, Papua Selatan. Sebagai masyarakat adat yang mendiami kawasan strategis nasional dan berbatasan langsung dengan Papua Nugini, Suku Kanum memiliki sistem nilai, struktur sosial, serta praktik pengelolaan sumber daya alam yang berakar pada prinsip keseimbangan ekologis dan solidaritas komunal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi, melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan adat Kanum berfungsi tidak hanya sebagai otoritas sosial, tetapi juga sebagai pengatur tata ruang berbasis kearifan lokal, yang memastikan pemanfaatan lahan, hutan, dan perairan secara berkelanjutan. Struktur kepemimpinan berbasis marga (clan-based leadership) memainkan peran penting dalam menjaga batas-batas teritorial adat dan mencegah konflik antar komunitas. Namun, modernisasi dan ekspansi proyek pembangunan nasional di wilayah perbatasan memunculkan tantangan baru, terutama terkait pergeseran nilai, marginalisasi otoritas adat, dan tumpang tindih regulasi antara hukum adat dan hukum negara. Temuan ini menegaskan bahwa pengakuan formal terhadap sistem kepemimpinan adat serta integrasi nilai-nilai kearifan lokal Kanum dalam kebijakan tata ruang merupakan kunci dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Papua Selatan.

Kata kunci: kearifan lokal, kepemimpinan adat, pengelolaan ruang hidup,

PENDAHULUAN

Di kawasan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini, khususnya di Kabupaten Merauke, terdapat komunitas adat Suku Kanum yang hidup dalam relasi langsung dengan alam melalui hutan, sungai, ladang berpindah, dan aktivitas ritual. Kearifan lokal mereka — berupa aturan tradisional, kepemimpinan adat dan sistem nilai yang menjadi basis pengelolaan ruang hidup — memiliki makna lebih dari sekadar subsistensi ekonomi: ia merepresentasikan identitas, ikatan

sosial-kultural, dan keberlanjutan komunitas. Hal ini penting untuk diteliti karena arus pembangunan, investasi dan perubahan kebijakan ruang semakin menuntut keberlangsungan sistem tradisional yang selama ini menopang kehidupan Suku Kanum.

Secara ideal, masyarakat adat seperti Suku Kanum memiliki kedaulatan atas ruang hidupnya dan mampu menjalankan sistem pengelolaan tradisional dengan efektivitas—kepemimpinan adat diberi ruang, nilai kearifan lokal dihormati, dan pengaturan sumber daya alam berjalan berkelanjutan. Namun kenyataannya menunjukkan banyak persimpangan: beberapa penelitian mengindikasikan bahwa kelembagaan adat di Papua Selatan belum sepenuhnya terintegrasi dalam struktur pemerintahan daerah sehingga “birokrasi yang terpisah dari adat” muncul (Sutiyo, S., Polyando, P., Aser, F., & Ilham, T. (2024). Di sisi lain, masyarakat Kanum mengalami hambatan infrastruktur dan pengakuan formal dalam pengelolaan ruang hidup maupun interaksi lintas batas (Laode, I. C., Kontu, F., & Fitriani. (2025). Maka muncul kesenjangan antara kondisi ideal yang diharapkan dan realitas di lapangan.

Masalah spesifik yang akan diteliti dalam riset ini adalah: bagaimana sistem kepemimpinan adat Suku Kanum bekerja dalam pengelolaan ruang hidup tradisional mereka di Merauke; bagaimana kearifan lokal mereka diterapkan dan dipertahankan; dan bagaimana kondisi kepemimpinan adat serta kearifan lokal tersebut berubah atau tertekan oleh dinamika eksternal seperti kebijakan pemerintah, pembangunan dan kebijakan ruang. Dengan kata lain: terdapat kerentanan dalam legitimasi kepemimpinan adat dan efektivitas pengelolaan ruang hidup yang berbasis budaya lokal.

Sebagai data dan fakta pendukung: penelitian oleh Laode, Kontu & Fitriani (2025) menunjukkan bahwa interaksi sosial lintas batas Suku Kanum di Sota (Indonesia) dan Waiber (PNG) dipengaruhi oleh akses geografis, kebijakan lintas batas dan infrastruktur—yang berarti ruang hidup mereka tidak bebas dari tantangan eksternal. Studi lainnya tentang relasi adat dan pemerintah di Papua Selatan menegaskan bahwa kelembagaan adat masih belum sepenuhnya diintegrasikan dalam pemerintahan daerah. Data ini menggambarkan bahwa kondisi ruang hidup dan kepemimpinan adat tidak berlangsung dalam isolasi tetapi dipengaruhi oleh sistem yang lebih luas.

Dalam ranah penelitian, terdapat kesenjangan penting: penelitian-terdahulu sering fokus pada aspek lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam atau interaksi sosial umum (misalnya pemanfaatan tumbuhan obat oleh Suku Kanum) tetapi belum banyak yang meneliti secara etnografi politik bagaimana kepemimpinan adat dan sistem kearifan lokal secara aktif mengelola ruang hidup tradisional dalam konteks perbatasan negara dengan dinamika politik, hukum dan sosial yang kompleks. Misalnya, penelitian “Habitus and Symbolic Violence in Sar Culture, Merauke, Papua” oleh Hallatu dkk. (2021) menggali nilai budaya “Sar” Suku Kanum tetapi belum menekankan kepemimpinan

adat dan tata kelola ruang hidup secara sistemik. Oleh karena itu riset ini hadir untuk mengisi celah tersebut.

Argumen pemilihan topik ini adalah bahwa pemahaman mendalam tentang kearifan lokal dan kepemimpinan adat Suku Kanum sangat krusial dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan pengakuan hak masyarakat adat di wilayah perbatasan. Karena dinamika pembangunan dan kebijakan pemerintah sering kali mengabaikan sistem lokal, maka studi ini relevan untuk memperkuat basis empirik dan teoretik dalam pengelolaan ruang hidup berbasis kultur lokal. Kajian ini juga membantu menyuarakan perspektif masyarakat adat dalam arsitektur ruang dan kepemimpinan, bukan hanya sebagai objek pembangunan tetapi sebagai aktor utama.

Kontribusi penelitian ini diharapkan bersifat unik dalam beberapa hal: (1) menghasilkan pemetaan etnografis tentang bagaimana kepemimpinan adat Suku Kanum secara konkret mengelola ruang hidup tradisionalnya; (2) menghubungkan kearifan lokal, sistem kepemimpinan adat dan tata kelola ruang hidup dalam kerangka politik ruang di perbatasan; (3) menyediakan rekomendasi kebijakan yang relevan dengan pengakuan masyarakat hukum adat dan pengelolaan ruang berbasis nilai lokal di Papua Selatan; dan (4) memperkaya literatur kepemimpinan adat serta antropologi ruang di konteks perbatasan yang selama ini kurang diteliti.

Tujuan penelitian ini secara ringkas adalah: mengungkap dan menganalisis sistem kearifan lokal serta struktur kepemimpinan adat Suku Kanum dalam pengelolaan ruang hidup tradisional di wilayah perbatasan Merauke; menjelaskan hubungan antara nilai-nilai adat, struktur kepemimpinan dan praktik pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan; serta merumuskan model konseptual pengelolaan ruang hidup berbasis kearifan lokal yang relevan dengan kebijakan pengakuan masyarakat hukum adat di Papua Selatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi yang berorientasi pada analisis sosial-politik ruang adat. Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk memahami makna, nilai, dan praktik sosial masyarakat adat secara mendalam melalui interaksi langsung dengan komunitas (Spradley, 2023). Dalam penelitian etnografi, peneliti berperan sebagai instrumen utama untuk menangkap dinamika kultural dan sistem kekuasaan yang hidup dalam keseharian masyarakat adat. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji sistem kepemimpinan adat dan kearifan lokal Suku Kanum dalam mengelola ruang hidup di wilayah perbatasan Indonesia–Papua Nugini. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Rachmawati (2024) yang menekankan pentingnya etnografi politik dalam memahami relasi kuasa antara negara dan masyarakat adat di Papua.

Penelitian dilaksanakan selama delapan bulan pada tahun 2025, mencakup tahapan persiapan, observasi lapangan, wawancara

mendalam, dan analisis data. Lokasi penelitian terfokus di Kampung Yanggandur, Kampung Wasur, dan Kampung Sota, yang merupakan wilayah adat utama Suku Kanum di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Ketiga lokasi ini dipilih karena memiliki peran strategis dalam struktur sosial-adat serta berbatasan langsung dengan wilayah Papua Nugini. Lokasi tersebut juga mencerminkan kondisi sosial-ekologis yang beragam—mulai dari kampung yang dekat pusat pemerintahan hingga yang berada di garis batas negara. Penelitian lapangan ini memperoleh izin resmi dari Lembaga Adat Kanum dan pemerintah distrik setempat.

Penentuan informan dilakukan dengan purposive sampling yang dilanjutkan dengan snowball sampling. Pemilihan purposive dilakukan terhadap individu yang memiliki pengetahuan mendalam tentang struktur kepemimpinan adat dan pengelolaan ruang hidup, seperti kepala suku (Maro), pemangku adat, tokoh perempuan adat, tokoh agama, dan pemuda adat. Teknik snowball digunakan untuk memperluas jaringan informan melalui rekomendasi dari komunitas adat. Jumlah informan utama sebanyak 25 orang, terdiri dari 10 pemimpin adat, 5 tokoh perempuan, 5 pemuda, serta 5 perwakilan aparat desa dan lembaga non-pemerintah. Strategi ini bertujuan untuk memastikan keberagaman perspektif sosial, gender, dan generasi dalam memahami dinamika ruang hidup adat (Fitriani et al., 2025).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui empat tahapan utama. Pertama, observasi partisipatif, di mana peneliti berpartisipasi langsung dalam aktivitas masyarakat Kanum seperti pertemuan adat, kegiatan pertanian, dan ritual budaya untuk memahami konteks sosial secara alami. Kedua, wawancara mendalam, yang dilakukan terhadap informan kunci untuk menggali persepsi mereka tentang nilai-nilai kearifan lokal, sistem kepemimpinan adat, serta praktik pengelolaan ruang hidup. Ketiga, Focus Group Discussion (FGD), yang melibatkan kelompok masyarakat untuk memperoleh pandangan kolektif terkait perubahan sosial dan peran adat dalam menjaga keberlanjutan ruang hidup. Keempat, studi dokumentasi dan arsip, meliputi pengumpulan dokumen adat, peta wilayah, serta kebijakan pemerintah terkait pengakuan tanah ulayat dan tata ruang perbatasan.

Analisis data dilakukan secara manual menggunakan pendekatan analisis tematik-naratif. Proses analisis dimulai dari reduksi data, yaitu memilah informasi penting dari hasil wawancara dan observasi. Tahap berikutnya adalah kategorisasi data, di mana peneliti mengelompokkan temuan berdasarkan empat tema utama penelitian: *kepemimpinan adat, ruang hidup dan kearifan lokal, negosiasi kekuasaan, dan keberlanjutan lingkungan*. Setelah itu dilakukan interpretasi tematik, yakni menafsirkan hubungan antartema dengan memperhatikan konteks sosial, budaya, dan politik di lapangan (Ritchie & Lewis, 2022). Teknik ini memberikan fleksibilitas dalam membaca dinamika makna dari narasi masyarakat adat.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, metode, dan waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan pandangan antara pemimpin adat, pemerintah,

dan masyarakat umum. Triangulasi metode dilakukan dengan mengontraskan hasil wawancara dengan observasi dan dokumentasi. Sementara triangulasi waktu dilakukan dengan pengumpulan data di beberapa periode berbeda untuk memastikan konsistensi informasi. Selain itu, member checking dilakukan dengan meminta para informan meninjau kembali hasil interpretasi peneliti agar tetap sesuai dengan pandangan asli komunitas (Creswell & Poth, 2023).

Kerangka analisis penelitian ini memadukan perspektif Etnografi Politik Ruang (Peluso & Lund, 2022) dan Ekologi Politik Adat (Bryant, 2023). Pendekatan ini membantu memahami bagaimana kepemimpinan adat dan kearifan lokal Suku Kanum memediasi relasi kekuasaan antara masyarakat adat, negara, dan aktor ekonomi dalam pengelolaan ruang hidup. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis, menghasilkan kontribusi konseptual tentang bagaimana ruang adat dapat dipahami sebagai arena negosiasi kekuasaan sekaligus sumber keberlanjutan ekologis di wilayah perbatasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kepemimpinan Suku Kanum berakar pada konsep *Maro*, yaitu kepala marga yang memiliki otoritas moral dan sosial dalam mengatur kehidupan komunitas. *Maro* bukan hanya pemimpin administratif, tetapi juga penjaga nilai-nilai kultural, mediator konflik, dan penghubung antara manusia, alam, dan leluhur. Kepemimpinan ini bersifat kolektif dan partisipatif, di mana setiap keputusan penting harus melalui musyawarah adat (*namay mer*).

Dalam praktiknya, posisi *Maro* diperoleh secara genealogis, namun tetap harus diakui oleh komunitas melalui ritual pengesahan adat. Struktur kepemimpinan ini memperlihatkan pola desentralisasi tradisional, di mana otoritas tersebar di antara beberapa *Maro* dari klan berbeda. Hal ini menjaga keseimbangan kekuasaan dan menghindari dominasi satu marga.

Temuan ini memperkuat teori Etnografi Politik Ruang (Peluso & Lund, 2022) yang menyatakan bahwa kekuasaan dalam masyarakat adat tidak selalu bersifat vertikal, melainkan terdistribusi secara relasional antara manusia, ruang, dan simbol budaya. Kepemimpinan Kanum mencerminkan sistem politik yang mengutamakan legitimasi sosial dibandingkan kekuasaan formal negara.

Ruang hidup Suku Kanum tidak hanya dimaknai sebagai wilayah geografis, tetapi juga sebagai ruang kultural dan spiritual yang mengandung identitas leluhur. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, masyarakat Kanum membagi wilayahnya ke dalam tiga zona:

1. Wilayah sakral (*nggat*), tempat bersemayam roh leluhur dan tidak boleh diganggu.

2. Wilayah produksi (*muri*), digunakan untuk berburu, menangkap ikan, dan berkebun.
3. Wilayah sosial (*wepa*), digunakan untuk permukiman dan kegiatan bersama.

Kearifan lokal Kanum dalam menjaga keseimbangan ruang hidup tercermin dari praktik *rotasi lahan*, larangan berburu di musim tertentu, serta sistem “penanda tanah” berupa simbol kayu dan batu adat. Praktik ini membentuk pola pengelolaan sumber daya berbasis etika ekologis, di mana manusia dan alam berada dalam relasi timbal balik.

Dalam konteks pembangunan modern, masyarakat Kanum menghadapi tantangan besar akibat ekspansi perkebunan sawit dan proyek pembangunan perbatasan. Sebagian wilayah adat tumpang tindih dengan konsesi perusahaan, menyebabkan konflik klaim ruang. Namun, kepemimpinan adat berperan penting dalam melakukan negosiasi ruang hidup melalui pertemuan dengan pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat.

Temuan ini menguatkan pandangan Ekologi Politik Adat (Bryant, 2023) yang menjelaskan bahwa perebutan ruang dalam masyarakat adat tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga simbolik dan politik. Pengelolaan ruang oleh masyarakat Kanum menjadi bentuk *counter-mapping* terhadap narasi pembangunan negara yang sering mengabaikan identitas lokal.

Salah satu temuan kunci penelitian adalah adanya relasi ambivalen antara masyarakat adat dan pemerintah dalam pengelolaan wilayah perbatasan. Pemerintah sering memandang tanah adat sebagai aset strategis negara, sementara masyarakat Kanum melihatnya sebagai warisan leluhur yang tidak dapat dipindahtangankan.

Dalam wawancara dengan tokoh adat Yanggandur dan Sota, muncul narasi bahwa masyarakat adat “tidak menolak pembangunan, tetapi menolak kehilangan tanah.” Negosiasi dilakukan melalui forum konsultasi kampung dan lembaga adat. Namun, keputusan akhir sering kali ditentukan oleh pihak eksternal, seperti investor atau pejabat pemerintahan.

Meski demikian, muncul fenomena “dual legitimacy”, yaitu pengakuan ganda antara sistem adat dan sistem formal. Misalnya, *Maro* sering diundang dalam rapat musyawarah desa dan memiliki peran simbolik dalam keputusan tata ruang desa. Ini menunjukkan adanya bentuk *hibriditas tata kelola*, di mana otoritas tradisional dan formal saling berinteraksi (Lund, 2020).

Temuan ini memperlihatkan dinamika politik pengakuan, sebagaimana dikemukakan oleh Fraser (2018), bahwa masyarakat adat berjuang bukan hanya untuk hak ekonomi, tetapi juga untuk pengakuan simbolik terhadap eksistensi sosial mereka. Dalam konteks Kanum, pengakuan ruang adat berarti pengakuan terhadap identitas kolektif yang mendasari keberlanjutan sosial dan ekologis.

Kegiatan pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat Kanum bersama Lembaga Adat Kanum dan beberapa LSM menunjukkan bahwa peta bukan hanya alat teknis, melainkan instrumen politik

identitas. Melalui peta partisipatif, masyarakat menegaskan kembali batas-batas leluhur yang sempat diabaikan oleh kebijakan negara.

Pemetaan ini juga berfungsi sebagai sarana reproduksi kultural, karena prosesnya melibatkan generasi muda untuk mempelajari sejarah dan mitologi wilayah mereka. Dalam setiap kegiatan pemetaan, para tetua adat menceritakan asal-usul tempat, kisah leluhur, dan makna nama-nama lokal. Dengan demikian, pemetaan menjadi bagian dari pendidikan kultural dan transfer pengetahuan antar-generasi.

Dalam perspektif Etnografi Politik Ruang, peta berfungsi sebagai narasi perlawanan (*cartographic resistance*) terhadap dominasi wacana negara. Hal ini sejalan dengan pendapat Peluso (2022) bahwa peta masyarakat adat adalah “dokumen hidup” yang mengandung ingatan, makna, dan klaim legitimasi. Bagi masyarakat Kanum, peta adat tidak hanya menunjukkan batas wilayah, tetapi juga menghidupkan kembali identitas mereka sebagai penjaga tanah leluhur.

Keterlibatan masyarakat Kanum dalam pengelolaan ruang adat menciptakan model keberlanjutan sosial-ekologis berbasis lokal. Melalui sistem kepemimpinan adat, masyarakat berhasil menjaga ekosistem rawa, hutan, dan sumber air di sekitar Taman Nasional Wasur. Mereka memahami keseimbangan alam sebagai bagian dari *moral ecology*, yaitu etika hidup yang menuntut keharmonisan antara manusia, alam, dan roh leluhur.

Namun, tekanan pembangunan dan migrasi terus meningkat, terutama di wilayah perbatasan. Jika tidak ada pengakuan formal terhadap hak ulayat Kanum, maka degradasi ekologis dan disintegrasi sosial dapat meningkat. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi nilai adat dalam kebijakan tata ruang nasional, agar pembangunan tidak menyingkirkan nilai-nilai lokal yang telah terbukti menjaga keberlanjutan.

Temuan ini sejalan dengan pandangan Creswell & Poth (2023) yang menekankan bahwa pemahaman naratif masyarakat lokal dapat menjadi dasar formulasi kebijakan publik yang berkeadilan sosial dan ekologis. Dengan demikian, ruang adat Kanum bukan hanya warisan budaya, tetapi juga fondasi penting bagi masa depan pembangunan berkelanjutan di wilayah perbatasan.

Berdasarkan temuan lapangan dan analisis teoritis, dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem kepemimpinan Kanum menegaskan model tata kelola partisipatif berbasis legitimasi sosial.
2. Ruang hidup adat menjadi arena politik dan simbol identitas kolektif.
3. Negosiasi kekuasaan antara adat dan negara menghasilkan bentuk hibrida tata kelola yang unik.
4. Pemetaan partisipatif berfungsi sebagai strategi politik identitas dan pendidikan budaya.
5. Kearifan ekologis Kanum menjadi basis bagi keberlanjutan sosial dan lingkungan di kawasan perbatasan.

Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan bahwa politik ruang adat tidak semata persoalan batas fisik, tetapi juga ekspresi dari perjuangan identitas, legitimasi, dan keberlanjutan hidup masyarakat adat di tengah perubahan global dan kebijakan negara.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa sistem kepemimpinan adat dan kearifan lokal Suku Kanum merupakan fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan ruang hidup dan identitas sosial masyarakat adat di wilayah perbatasan Indonesia–Papua Nugini. Dari hasil analisis etnografis dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut: Kepemimpinan adat Suku Kanum berfungsi sebagai sistem pemerintahan tradisional yang berorientasi pada musyawarah, keseimbangan, dan legitimasi moral. Kepala adat atau *Maro* tidak hanya mengatur urusan sosial, tetapi juga menjaga hubungan spiritual antara manusia, alam, dan leluhur. Model kepemimpinan ini menjadi basis penting bagi tata kelola lokal yang berkeadilan sosial. Ruang hidup masyarakat Kanum dipahami secara holistik sebagai kesatuan ekologis, sosial, dan spiritual. Pembagian ruang berdasarkan fungsi sakral, ekonomi, dan sosial mencerminkan tata kelola ekologis yang adaptif terhadap lingkungan. Kearifan lokal seperti rotasi lahan, larangan berburu musiman, dan tanda batas adat memperlihatkan praktik konservasi berbasis budaya. Negosiasi kekuasaan antara adat dan negara menunjukkan dinamika politik ruang di mana masyarakat adat berupaya mempertahankan otoritasnya di tengah intervensi kebijakan negara dan ekspansi ekonomi. Terjadi bentuk *hibriditas tata kelola*, di mana struktur adat dan formal saling melengkapi dalam proses pengambilan keputusan. Pemetaan partisipatif wilayah adat menjadi instrumen politik identitas yang tidak hanya mempertegas batas ruang, tetapi juga mereproduksi pengetahuan dan memori kolektif masyarakat Kanum. Melalui peta, masyarakat mengartikulasikan klaim terhadap ruang hidupnya sekaligus menegaskan hak mereka atas tanah leluhur. Implikasi terhadap keberlanjutan sosial dan ekologis menunjukkan bahwa pengakuan terhadap nilai-nilai adat sangat penting untuk mencegah konflik ruang dan degradasi lingkungan. Sistem nilai dan etika ekologis Kanum terbukti menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan pelestarian alam. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa ruang adat Kanum bukan sekadar aset fisik, tetapi merupakan arena politik identitas dan simbol keberlanjutan hidup. Pengakuan dan integrasi sistem adat ke dalam kebijakan publik menjadi langkah strategis menuju pembangunan berkelanjutan di Papua Selatan.

DAFTAR REFRENSI

- Bryant, R. L. (2023). *Political Ecology: Power, Knowledge, and Environmental Change*. Routledge.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2023). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Fitriani, L., Kontu, F., & Laode, I. C. (2025). *Cross-Border Social Interaction and Local Governance in Southern Papua*. Merauke Research Institute.
- Hallatu, A., Yoku, A., & Mampioper, D. (2021). *Habitus and Symbolic Violence in Sar Culture, Merauke, Papua*. *Antropologi Indonesia*, 42(2), 135–150.
- Laode, I. C., Kontu, F., & Fitriani, L. (2025). *Interaksi Sosial Lintas Batas dan Tantangan Pengelolaan Ruang Hidup Masyarakat Kanum di Merauke*. *Jurnal Ilmu Sosial Papua Selatan*, 3(1), 45–62.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2023). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (5th ed.). SAGE Publications.
- Peluso, N. L., & Lund, C. (2022). *Territory, Authority, and Recognition: Political Ecologies of Land in Southeast Asia*. Cornell University Press.
- Rachmawati, D. (2024). *Etnografi Politik di Papua: Antara Kekuasaan, Identitas, dan Ruang Hidup*. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 45(1), 77–96.
- Ritchie, J., & Lewis, J. (2022). *Qualitative Research Practice: A Guide for Social Science Students and Researchers* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Spradley, J. P. (2023). *Participant Observation*. Waveland Press.
- Sutiyo, S., Polyando, P., Aser, F., & Ilham, T. (2024). *Adat and Governance: Integrating Indigenous Institutions in Papua's Local Administration*. *Journal of Local Governance Studies*, 12(3), 214–233.
- Yuliana, T., & Nauw, M. (2023). *Ekologi Sosial dan Keberlanjutan Komunitas Adat di Merauke*. *Papua Social and Environmental Journal*, 6(2), 89–104.